

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 16.937 jiwa/km² (Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022). Kepadatan penduduk tersebut berimplikasi pada munculnya beberapa isu terkait pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak-hak anak sangatlah penting karena perkembangan karakter dan kualitas suatu bangsa bergantung pada potensi sumber daya manusia yang ada didalamnya. Anak-anak perlu dipersiapkan sedini mungkin melalui pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mereka dapat menjadi manusia yang berkualitas unggul di masa depan (Septiani, 2020: 14-15).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dan memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala jenis tindak kekerasan dan diskriminasi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan menikmati haknya untuk dapat tumbuh dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, berbagai faktor seperti faktor lingkungan, sosial dan ekonomi telah membuat anak kehilangan

haknya sendiri. Anak menjadi rentan terhadap berbagai macam tindak kekerasan, eksploitasi anak, pelecehan terhadap anak, hingga kasus penjualan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai instansi yang menangani kasus perlindungan anak mencatat bahwa terdapat sebanyak 494 kasus anak yang terjadi pada tahun 2020. Berikut merupakan data kasus anak dari P2TP2A:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Anak yang Ditangani P2TP2A di DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Kasus Anak
1.	Januari	67
2.	Februari	51
3.	Maret	58
4.	April	27
5.	Mei	21
6.	Juni	59
7.	Juli	54
8.	Agustus	38
9.	September	23
10.	Oktober	20
11.	November	41
12.	Desember	35
Jumlah		494

Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Tahun 2021 (<https://statistik.jakarta.go.id/korban-kekerasan-yang-ditangani-oleh-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-di-dki-jakarta/> diakses pada 21 Juni 2022).

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 jumlah kasus pada anak mengalami fluktuasi setiap bulannya. Jumlah kasus terbanyak terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 67 kasus dan kasus yang paling sedikit terjadi pada bulan Oktober, yaitu 20 kasus. Meskipun pada bulan Oktober jumlahnya mengalami penurunan, namun pada bulan berikutnya meningkat dua

kali lipat menjadi 41 kasus. Data tersebut membuktikan bahwa jumlah kasus pada anak belum sepenuhnya dapat ditekan secara optimal, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak sangatlah diperlukan demi mengedepankan kepentingan terpenuhinya hak-hak anak.

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik yang dimaksud yaitu adanya keterbukaan, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum (Annisa & Alhadi, 2019: 68-74). Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dijelaskan bahwa Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Pendekatan ini melibatkan proses perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta diimplementasikan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Dalam mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA), Kabupaten/Kota harus dapat memenuhi indikator-indikator KLA. Indikator-indikator tersebut terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak. 5 klaster tersebut yaitu: 1.) Hak sipil dan kebebasan, 2.) Lingkungan Keluarga dan pengasuhan anak, 3.) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4.) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta 5.) perlindungan khusus (Andriani et al., 2019: 1-8).

DKI Jakarta menjadi salah satu dari 10 provinsi pertama yang ditunjuk sebagai provinsi yang menjadi proyek pencontohan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010.

Tabel 1. 2 10 Provinsi *Pilot Project* Pengembangan Kab/Kota Layak Anak (KLA)

No.	Nama Provinsi
1.	DKI Jakarta
2.	Jawa Barat
3.	Yogyakarta
4.	Jawa Tengah
5.	Jawa Timur
6.	Bali
7.	Sumatera Utara
8.	Kalimantan Timur
9.	Kepulauan Riau
10	Banten

Sumber: Dokumen Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 56 Tahun 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013, Kota Administrasi Jakarta Timur ditunjuk sebagai salah satu kota administrasi untuk pengembangan Kota Layak Anak. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi program pertama yang diupayakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam upaya memenuhi hak-hak dasar anak. RPTRA merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia. Fokus dari RPTRA ini yaitu menjadi *community center* melalui penyelenggaraan layanan kegiatan anak, layanan masyarakat dan layanan kebencanaan (Malau, 2017: 66).

RPTRA dikatakan ramah anak dibandingkan taman bermain biasa karena di dalam RPTRA terdapat sarana bermain beserta lapangan olah raga yang dikhususkan sebagai tempat bermain dan sarana penunjang kreativitas yang aman dan nyaman untuk anak, terdapat juga perpustakaan sebagai fasilitas edukasi yang menyediakan berbagai buku bacaan untuk anak-anak. Selain itu, RPTRA juga dikenal sebagai ruang publik yang bebas dari paparan asap rokok yang berpotensi membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak. Dengan berbagai keunggulan tersebut, dapat diketahui bahwa RPTRA berbeda dengan taman bermain biasa. RPTRA sangat memperhatikan aspek lingkungan yang ramah terhadap anak, sehingga diharapkan dengan adanya RPTRA ini dapat melindungi dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan lingkungan bermain dan lingkungan sosialisasi yang aman dan nyaman (Septiani, 2020: 18-19). RPTRA umumnya dibangun di kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk dengan tujuan agar manfaat dari keberadaan RPTRA ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sekitar juga dilibatkan secara aktif dalam pemeliharaan RPTRA agar masyarakat merasa bahwa RPTRA ini menjadi sarana publik milik bersama yang manfaatnya dirasakan bersama sehingga harus dijaga dan dilindungi bersama (Rakasiwi, 2019: 16).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, disebutkan bahwa RPTRA dibangun berdasarkan indikator dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tersedianya taman terbuka publik untuk memenuhi hak-hak anak;

- b. Tempat interaksi masyarakat segala usia, sarana permainan dan tumbuh kembang anak;
- c. Fasilitas kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya memberikan hak-hak anak;
- d. Komponen dari sarana dan prasarana Kebijakan KLA;
- e. Area terbuka hijau dan penyerapan air tanah;
- f. Fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan sosial masyarakat, termasuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan pelatihan keterampilan Kader PKK;
- g. Usaha untuk meningkatkan penghasilan keluarga;
- h. Fasilitas informasi dan konsultasi tentang keluarga;
- i. Halaman tempat tinggal masyarakat yang indah, asri, teratur dan nyaman; serta
- j. Sistem informasi manajemen.

Indikator pertama dari RPTRA yaitu tersedianya taman terbuka bagi anak untuk memenuhi hak anak, yang mana dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 telah menargetkan bahwa setidaknya di dalam 1 kelurahan tersedia minimal 1 RPTRA yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak-hak anak. Namun, berdasarkan data dari PKK Provinsi DKI Jakarta (2021), hingga tahun 2020 masih terdapat beberapa kelurahan di Jakarta Timur yang belum tersedia RPTRA. Selain itu, persebaran pembangunan RPTRA juga tidak merata, karena terdapat 2 bahkan 3 RPTRA dalam 1 kelurahan dengan lokasi yang berdekatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program RPTRA belum

dapat menjangkau seluruh kelurahan yang ada di Jakarta Timur. Data persebaran RPTRA tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data Persebaran RPTRA di Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Timur Tahun 2020

Kec Kel	Cakung	Cipayung	Ciracas	Duren Sawit	Jatinegara
1.	Cakung Barat**	Cilangkap* *	Ciracas*	Klender	Bidara Cina**
2.	Cakung Timur*	Ceger	Cibubur*	Duren Sawit**	Bali Mester
3.	Ujung Menteng* *	Bambu Apus*	Kelapa Dua Wetan**	Pondok Kelapa**	Cipinang Besar Utara*
4.	Pulo Gebang**	Cipayung*	Susukan*	Malaka Sari*	Cipinang Muara
5.	Penggilingan**	Pondok Ranggon**	Rambutan*	Pondok Bambu*	Cipinang Cempedak*
6.	Rawa Terate	Munjul		Malaka Jaya*	Cipinang Besar Selatan*
7.	Jatinegara* *	Lubang Buaya*		Pondok Kopi**	Rawa Bunga*
8.		Setu*			Kampung Melayu
Kec Kel	Kramat Jati	Pasar Rebo	Matraman	Makasar	Pulo Gadung
1.	Balekambang	Baru	Kayu Manis	Cipinang Melayu*	Cipinang
2.	Batu Ampar**	Cijantung	Kebon Manggis	Halim Perdana Kusuma	Jati*
3.	Cawang	Gedong*	Palmeriam	Kebon Pala*	Jatinegara Kaum**
4.	Cililitan*	Kalisari	Pisangan Baru	Makasar	Kayu Putih
5.	Dukuh	Pekayon**	Utang Kayu Utara*	Pinangranti*	Pisangan Timur
6.	Kramat Jati*		Utang Kayu Selatan**		Pulo Gadung*
7.	Tengah*				Rawamangun*

Ket : () Kelurahan yang belum ada RPTRA

(*) Kelurahan yang sudah dibangun 1 RPTRA

(**) Kelurahan yang sudah dibangun >1 RPTRA

Sumber: Dokumen PKK DKI Jakarta Data Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Provinsi DKI Jakarta Sampai Dengan Desember 2020 (<https://pkk.jakarta.go.id/data-pokja-iv/> diakses pada 20 Mei 2022).

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, disebutkan bahwa pada RPTRA dilaksanakan layanan anak sebagai berikut:

- a. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
- b. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- c. Perpustakaan Anak;
- d. Tempat bermain dan berolahraga anak;
- e. Kegiatan kreatif anak (minat dan bakat).

RPTRA Bambu Petung merupakan salah satu RPTRA di Jakarta Timur yang terletak di Kelurahan Bambu Apus. Dalam implementasinya, layanan anak yang telah diselenggarakan oleh Program RPTRA Bambu Petung diantaranya layanan bermain, layanan pengembangan minat dan bakat, serta layanan perpustakaan anak. Program RPTRA Bambu Petung belum menyelenggarakan layanan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sehingga belum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Layanan bermain merupakan layanan yang diselenggarakan Program RPTRA Bambu Petung melalui pengadaan alat permainan untuk anak. Ketentuan atau persyaratan sarana dan prasarana alat permainan anak diatur dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, diantaranya aman, tidak mudah terbakar dan tidak mengandung unsur kimia berbahaya. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi nonprofit di bidang kesehatan dan pembangunan lingkungan, yakni *Nexus3 Foundation* menunjukkan bahwa beberapa alat permainan pada layanan bermain anak di RPTRA Bambu Petung mengandung unsur kimia berbahaya, yaitu timbal dengan kandungan lebih dari 90ppm. Alat-alat permainan tersebut, diantaranya; 1.) tiang panjatan berwarna kuning dengan kandungan timbal 4.000 ppm; 2.) jungkat-jungkit berwarna kuning dengan kandungan timbal 4.100 ppm; dan 3.) perosotan berwarna kuning dengan kandungan timbal 4.080 ppm (Nexus3 Foundation, 2019: 23).

Temuan tersebut dicatat dalam publikasi berjudul "*Laporan Nasional Timbal dalam Peralatan Bermain di Indonesia*" pada Oktober 2019. *Nexus3 foundation* meneliti 32 taman bermain di Jakarta sebagai sampel, yakni 20 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 12 taman bermain yang dikelola swasta (Nexus3 Foundation, 2019: 12-15). Penelitian dilakukan dari September hingga Oktober 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Hasil Penelitian Nexus3 Foundation Terkait Penggunaan Timbal pada 32 Lokasi Sampel Taman Bermain di Jakarta

No	Lokasi Sampel	Hasil
1.	Taman Kota Kebagusan	<90 ppm
2.	RPTRA Tiga Durian	<90 ppm
3.	RPTRA Malinjo	<90 ppm
4.	RPTRA Asoka	<90 ppm
5.	Taman Spathodea	<90 ppm
6.	Taman Sepat	<90 ppm
7.	RPTRA Baung	<90 ppm
8.	Taman Jl. Madrasah, Gandaria	>90 ppm
9.	Taman Masjid Al-Hidayah	<90 ppm
10.	RPTRA Amir Hamzah	>90 ppm
11.	RPTRA Bambu Petung	>90 ppm
12.	Taman di Jalan Pulo Jawa	>90 ppm
13.	RPTRA Pulogebang Permai	<90 ppm
14.	Taman Gang Haji Walih, Pulogebang	>90 ppm
15.	Lapangan Basket RW 20, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara	>90 ppm
16.	RPTRA Gading Tarian	<90 ppm
17.	RPTRA Dewi Shinta	>90 ppm
18.	Taman Jalan Poncol Lestari	>90 ppm
19.	RPTRA Taman Guntur	>90 ppm
20.	Taman Danau Dampelas	<90 ppm
21.	RPTRA Taman Raning	<90 ppm
22.	Taman Menteng	>90 ppm
23.	RPTRA Gondangdia	<90 ppm
24.	RPTRA Jatipulo	<90 ppm
25.	RPTRA Jeruk Manis	>90 ppm
26.	Taman Hutan Kota Srengseng	<90 ppm
27.	RPTRA Nusa Indah	<90 ppm
28.	RPTRA Meruya Selatan	>90 ppm
29.	RPTRA Menara	<90 ppm
30.	RPTRA Manuver	<90 ppm
31.	RPTRA Penjaringan	<90 ppm
32.	RPTRA Kalijodo	>90 ppm

Sumber: Dokumen Nexus3 Foundation Laporan Nasional Timbal dalam Peralatan Bermain di Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 RPTRA yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dan 4 taman bermain anak yang dikelola oleh swasta positif mengandung timbal dengan konsentrasi lebih dari 90 ppm. *World*

Health Organization (WHO) menetapkan 90 ppm sebagai batas takaran aman kandungan timbal dalam cat. Paparan timbal di atas 90 ppm sangat berbahaya bagi anak-anak, terutama pada usia enam tahun ke bawah. Begitu timbal memasuki tubuh anak melalui proses menelan, menghirup, atau melintasi plasenta, hal tersebut berpotensi merusak beberapa sistem dan jalur biologis. Target utama timbal adalah sistem saraf pusat dan otak, tetapi timbal juga dapat mempengaruhi sistem darah, ginjal, dan kerangka tubuh. Cat yang terkelupas pada bagian yang sering diakses anak-anak saat bermain menjadi salah satu sumber pajanan timbal. Timbal dapat masuk ke tubuh melalui mulut, kulit, dan saluran napas yang dapat membahayakan kesehatan anak. Menurut *WHO*, keracunan timbal terbukti memicu berkurangnya kecerdasan anak dan keterbelakangan mental. Timbal memberikan kontribusi sekitar 0,6 persen terhadap beban penyakit secara global (Nexus3 Foundation, 2019: 4-5).

Temuan kandungan timbal pada alat permainan di RPTRA Bambu Petung tersebut juga bertentangan dengan status RPTRA Bambu Petung sebagai peraih nilai tertinggi standarisasi dan sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) se-Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI (Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur, 2019). Penilaian proses standarisasi dan sertifikasi RBRA tersebut, menggunakan 13 persyaratan, yaitu lokasi, kemudahan, pemanfaatan, material, penghawaan udara, vegetasi, peralatan bermain, keamanan, keselamatan, kesehatan/kebersihan, kenyamanan, pengelolaan dan pencahayaan. Selain itu, proses penilaian juga menggunakan 8 prinsip pengembangan RBRA, yaitu gratis, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

anak, partisipasi anak, aman, nyaman, selamat, ide kreatif dan inovatif, serta sehat (KemenPPPA RI, 2019). Dengan demikian, temuan timbal pada alat permainan anak dalam layanan bermain di RPTRA Bambu Petung melanggar persyaratan RBRA, yaitu keamanan, keselamatan, dan kesehatan/kebersihan, serta melanggar prinsip aman, selamat dan sehat.

Nexus3 foundation meminta agar Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengadaan cat bebas timbal untuk pengecatan dan perawatan terhadap peralatan bermain serta sarana dan prasarana lain yang ada di RPTRA Bambu Petung. Namun, hingga akhir tahun 2021, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur tidak menindaklanjuti rekomendasi dari *Nexus3 foundation* terkait kasus penggunaan timbal tersebut. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur justru meminta *Nexus3 Foundation* untuk bertanggung jawab atas temuan timbal tersebut (VOI Indonesia, 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin menganalisis terkait bagaimana keberhasilan dari Program RPTRA Bambu Petung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di dalam Program tersebut dengan membuat penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur”**. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pengembangan RPTRA Bambu Petung dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, serta bagi masyarakat, pengelola, dan pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat teridentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

1. Program RPTRA Bambu Petung belum menyelenggarakan layanan kegiatan anak yaitu BKB-PAUD dan Posyandu seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA.
2. Beberapa alat permainan anak pada layanan bermain yang diselenggarakan Program RPTRA Bambu Petung mengandung timbal lebih dari 90 ppm yang berpotensi membahayakan kesehatan anak.
3. Lambatnya responsivitas Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menindaklanjuti temuan alat permainan anak mengandung timbal pada layanan kegiatan bermain di RPTRA Bambu Petung.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keberhasilan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan hak anak?
2. Apa saja faktor penghambat Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan hak anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan Program RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan hak anak.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat Program RPTRA Bambu Petung dalam upaya pemenuhan hak anak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Program dengan mengembangkan teori-teori yang ada sehingga memperkaya hasil pengetahuan ilmiah yang baru. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penelitian dengan topik permasalahan yang serupa, serta dapat memberikan masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan langsung terkait penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lain yang meneliti terkait evaluasi Program Pemerintah sebagai objek

penelitiannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran kepada tim pengelola RPTRA dan Sudin PPAPP Jakarta Timur agar RPTRA menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mampu memenuhi hak-hak anak.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Judul	Tujuan	Teori & Metode	Hasil Penelitian
1.	Puri Ventika Malau (2017) Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat	Mengetahui pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan pembangunannya sudah optimal.	Teori: Evaluasi Kebijakan menurut James Anderson Metode: Deskriptif Kualitatif	Program belum berjalan dengan baik karena masih terdapat keterbatasan jumlah sarana dan prasarana.
2.	Raidah Sulistiarini (2019) Evaluasi Program Pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Terhadap Kebutuhan Bermain Outdoor Anak Usia Dini di RPTRA Baung Jakarta Selatan	Menilai keberhasilan pelaksanaan program RPTRA	Teori: Evaluasi Program CIPP menurut Daniel Stufflebeam Metode: Deskriptif Kualitatif	Keberhasilan Program RPTRA Baung memperoleh predikat sangat baik.
3.	Nurul Annisa & Zikri Alhadi (2019) Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak dalam Penyediaan Infrastruktur	Mengkaji bagaimana penyediaan infrastruktur ramah anak di Kota Padang	Teori: Evaluasi Kebijakan menurut W. Dunn	Penyediaan fasilitas publik ramah anak di Kota Padang sudah baik namun belum maksimal.

No.	Penulis & Judul	Tujuan	Teori & Metode	Hasil Penelitian
	(Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Kota Padang		Metode: Deskriptif Kualitatif	
4.	Tias Dewi Septiani (2020) Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek terhadap Pemenuhan Hak Anak di Jakarta Selatan	Melihat sejauh mana keberhasilan program RPTRA Anggrek Bintaro	Teori: Evaluasi Program CIPP menurut Daniel Stufflebeam Metode: Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan layanan pada RPTRA Anggrek sudah cukup baik dilihat dari manfaat yang dirasakan anak-anak.
5.	Rano Saputra (2020) Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram	Mengetahui keberhasilan program RTH dan upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas RTH di Kota Mataram.	Teori: Evaluasi Kebijakan menurut William Dunn Metode: Deskriptif Kualitatif	Masyarakat telah menikmati manfaat program pengembangan RTH meskipun masih banyak program pengembangan RTH yang belum terealisasi.
6.	Riyawati Ika Dewi, Ahman Sya & Diana Vivanti Sigit (2020) Evaluasi Program Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Wilayah DKI Jakarta)	Menganalisis keberhasilan program penyediaan RTH di DKI Jakarta	Teori: Evaluasi Program CIPP menurut Daniel Stufflebeam Metode: Campuran (kualitatif dan kuantitatif)	Program Penyediaan RTH di DKI Jakarta masih harus diperbaiki kedepannya agar dapat mencapai tujuan program.

No.	Penulis & Judul	Tujuan	Teori & Metode	Hasil Penelitian
7.	Jumari & Suwandi (2020) <i>Evaluation of Child-Friendly Schools Program in Islamic Schools using the CIPP Model</i>	Mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Jombang.	Teori: Evaluasi Program CIPP menurut Daniel Stufflebeam Metode: Deskriptif Kualitatif	Evaluasi konteks: program sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan terdapat landasan hukum. Evaluasi input: adanya tim SRA dan fasilitas pendukung program. Evaluasi proses: program terlaksana dengan sangat baik. Evaluasi produk: berhasil meraih penghargaan tertinggi.
8.	Jasra Putra, Eliana Sari & Makruf Akbar (2020) <i>Policy Evaluation of Child-Friendly Schools in Depok City; Indonesia</i>	Melihat keberhasilan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok.	Teori: Client-Centered Evaluation Approach menurut Robert E. Stake Metode: Deskriptif Kualitatif	Sekolah Ramah Anak sudah terealisasi secara alami, bukan hasil intervensi program.
9.	Sundari (2022) Evaluasi Program Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Jalur Hijau Jalan di Kota Jambi (Studi Kasus Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru)	Menganalisis evaluasi RTH publik jalur hijau jaan di sepanjang Jalan Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru.	Teori: Evaluasi Kebijakan menurut William Dunn Metode: Deskriptif Kualitatif	RTH Publik jalur hijau jalan sudah terlaksana namun belum memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 5 tahun 2008.

No.	Penulis & Judul	Tujuan	Teori & Metode	Hasil Penelitian
10.	Frida Lastiani (2023) Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Guna Pemenuhan Hak Anak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus RPTRA Bandar Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat)	Melihat sejauh mana keberhasilan Program RPTRA Bandar Kemayoran	Teori: Evaluasi Program CIPP menurut Daniel Stufflebeam Metode: Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan program RPTRA sudah berjalan dengan cukup baik sehingga dampaknya dirasakan sudah dirasakan oleh sasaran program.

Jurnal pertama ditulis oleh Puri Ventika Malau (2017), tentang evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat. Bertujuan untuk mengetahui pembangunan RPTRA di Jakarta Pusat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan pembangunannya sudah optimal. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di RPTRA belum berjalan dengan optimal, belum terealisasi pembangunan 1 RPTRA dalam 1 Kelurahan di Jakarta Pusat karena keterbatasan lahan, penyempurnaan revisi Pergub dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian, yakni mengkaji mengenai evaluasi program. Perbedaan penelitian terdapat pada analisis penelitian, yaitu penelitian tersebut mengkaji menggunakan teori evaluasi menurut James Anderson dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA, sedangkan penelitian ini mengkaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut pada RPTRA di Jakarta Selatan, sedangkan penelitian ini pada RPTRA Bambu Petung di Jakarta Timur.

Raidah Sulistiarini (2019), melakukan penelitian tentang evaluasi program pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak terhadap kebutuhan bermain *outdoor* anak usia dini di RPTRA Baung Jakarta Selatan. Bertujuan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak terhadap kebutuhan bermain *outdoor* anak usia dini di RPTRA Baung Kebagusan

Jakarta Selatan. Berhasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RPTRA Baung dalam memenuhi kebutuhan bermain outdoor anak usia dini memperoleh predikat sangat baik, setelah tersedianya RPTRA Baung ini kebutuhan bermain anak terpenuhi dan tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal serta meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menunjang kebutuhan sehari-hari. Persamaan penelitian terletak pada topik yang dibahas dan analisis teori yang digunakan, yakni evaluasi program yang dikaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam, yang terdiri dari evaluasi konteks, masukan, proses dan produk. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut membahas pada RPTRA Baung di Kebagusan Jakarta Selatan, sedangkan penelitian ini pada RPTRA Bambu Petung di Jakarta Timur.

Nurul Annisa dan Zikri Alhadi (2019), melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak dalam penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di Kota Padang. Bertujuan untuk mengkaji penyediaan infrastruktur ramah anak di Kota Padang. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas publik ramah anak di Kota Padang sudah baik namun belum maksimal. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian, yakni mengenai evaluasi terhadap program yang berkaitan dengan kota layak anak. perbedaan penelitian terletak pada analisis teori yang digunakan, penelitian tersebut mengkaji menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn, sedangkan penelitian ini mengkaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam.

Tias Dewi Septiani (2020), melakukan penelitian tentang evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek terhadap pemenuhan hak anak di Jakarta Selatan. Bertujuan untuk melihat sejauh mana program berjalan dan untuk mengetahui hasil evaluasi program dari RPTRA Anggrek Bintaro. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program RPTRA Anggrek sudah cukup baik karena dampaknya sudah dirasakan anak-anak yang berada di sekitar RPTRA Anggrek Bintaro. Persamaan penelitian terletak pada topik yang dibahas dan analisis teori yang digunakan, yakni evaluasi program yang dikaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam, yang terdiri dari evaluasi konteks, masukan, proses dan produk. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut membahas pada RPTRA Anggrek di Bintaro, sedangkan penelitian ini pada RPTRA Bambu Petung di Jakarta Timur.

Rano Saputra (2020), melakukan penelitian tentang evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram. Bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram untuk meningkatkan RTH di Kota Mataram. Berhasil menunjukkan bahwa masyarakat telah menikmati manfaat dari Program Pengembangan RTH walaupun masih banyak Program Pengembangan RTH yang belum terealisasi, sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram yaitu melaksanakan agenda rapat koordinasi bulanan dan pelaporan ke Pemerintah Pusat di tiap tahunnya. Persamaan penelitian

terletak pada topik yang dibahas, yakni mengenai evaluasi program. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut membahas mengenai RTH di Kota Mataram, sedangkan penelitian ini mengenai RPTRA Bambu Petung. Perbedaan lainnya terletak pada analisis penelitian yang dilakukan menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn, yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Riyawati Ika Dewi, Ahman Sya dan Diana Vivanti Sigit (2020), melakukan penelitian tentang evaluasi Program Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (wilayah DKI Jakarta). Bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program penyediaan RTH di DKI Jakarta. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa Program Penyediaan RTH di DKI Jakarta masih harus diperbaiki kedepannya agar dapat mencapai tujuan program. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian dan analisis teori yang digunakan, yakni evaluasi program yang dikaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam, yang terdiri dari evaluasi konteks, masukan, proses dan produk. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut mengenai Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, sedangkan penelitian ini mengenai RPTRA Bambu Petung di Jakarta Timur.

Jumari dan Suwandi (2020), melakukan penelitian yang berjudul *evaluation of Child-Friendly Schools Program in Islamic Schools using the CIPP Model*. Bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Jombang. Berhasil menunjukkan bahwa program sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan terdapat landasan hukum, terdapat tim SRA dan fasilitas

pendukung program, program terlaksana dengan sangat baik, serta berhasil meraih penghargaan tertinggi. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian dan analisis teori yang digunakan, yakni mengenai evaluasi program yang dikaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam, yang terdiri dari evaluasi konteks, masukan, proses dan produk. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut pada sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang, sedangkan penelitian ini pada RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur.

Jasra Putra, Eliana Sari dan Makruf Akbar (2020), melakukan penelitian tentang *policy evaluation of Child-Friendly Schools in Depok City; Indonesia*. Bertujuan untuk melihat keberhasilan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa Sekolah Ramah Anak sudah terealisasi secara alami, bukan hasil intervensi program. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian, yakni evaluasi program. Perbedaan penelitian terletak pada teori analisis yang digunakan, dimana penelitian tersebut menggunakan teori *Client-Centered Evaluation Approach* menurut Robert E. Stake, sedangkan penelitian ini menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut mengkaji pada Sekolah Ramah Anak di Kota Depok, sedangkan penelitian ini pada RPTRA Banbu Petung di Jakarta Timur.

Sundari (2022), melakukan penelitian tentang evaluasi program pemerintah daerah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik jalur hijau jalan di Kota Jambi (studi kasus Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kecamatan Kota

Baru). Bertujuan untuk menganalisis evaluasi RTH publik jalur hijau jalan di sepanjang Jalan Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa RTH Publik jalur hijau jalan sudah terlaksana namun belum memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 5 tahun 2008. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian, yakni mengenai evaluasi program. Perbedaan penelitian terletak pada analisis teori yang digunakan, dimana penelitian tersebut menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn, sedangkan penelitian ini menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut pada RTH di Jl. Jend. Basuki Rahmat, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, sedangkan penelitian ini pada RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur.

Frida Lastiani (2023), melakukan penelitian tentang evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) guna pemenuhan hak anak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (studi kasus RPTRA Bandar Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat). Bertujuan untuk melihat sejauh mana program berjalan dan untuk mengetahui hasil evaluasi Program dari RPTRA Bandar Kemayoran. Berhasil menunjukkan pelaksanaan program RPTRA Bandar Kemayoran sudah cukup baik, karena dampaknya sudah dirasakan guna pemenuhan hak anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, terletak pada topik yang dibahas dan analisis teori yang digunakan, yakni mengenai evaluasi program yang dikaji menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam, yang terdiri dari evaluasi konteks, masukan, proses dan produk. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut membahas

mengenai RPTRA Bandar Kemayoran, sedangkan penelitian ini mengenai RPTRA Bambu Petung.

Berdasarkan seluruh referensi yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan perbedaan penelitian mengenai evaluasi program pada penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Daniel Stufflebeam, yang terdiri dari evaluasi konteks, masukan, proses dan produk (Stufflebeam & Coryn, 2014: 312-313). Perbedaan lain terdapat pada fokus, lokus dan subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis evaluasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Lokus penelitian dilakukan di RPTRA Bambu Petung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Subjek penelitian terdiri dari pihak Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur, pihak Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung dan para pengunjung RPTRA Bambu Petung. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan Program RPTRA Bambu Petung dalam upaya pemenuhan hak anak serta apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan solusi perbaikan dalam pelaksanaan Program RPTRA Bambu Petung di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1988) (dalam Keban, 2014: 3), mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses ketika sumber daya dan personil publik

diintegrasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik.

Nigro & Nigro (dalam Keban, 2014: 5-6), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi kelompok dalam lingkup publik, yang melibatkan tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki peran penting dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Pandangan lain dikemukakan oleh Nicholas Henry (1988) (dalam Keban, 2014: 6), yang mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu perpaduan yang saling berhubungan antara teori dan praktik guna mendorong pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengupayakan agar kebijakan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara terorganisir dengan melibatkan banyak pihak baik itu pemerintah, swasta, komunitas dan *stakeholders* lainnya yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.

1.5.2.2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn (1970) (dalam Keban, 2014: 31), paradigma merupakan cara pandang dalam memecahkan masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada periode tertentu. Kepercayaan dari cara pandang tersebut dapat terkikis jika diterpa tantangan dari luar sehingga mengalami krisis atau *anomalies*. Akibatnya,

masyarakat akan mencari cara pandang baru yang lebih sesuai. Orang akan mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai, sehingga muncul suatu paradigma yang baru.

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, krisis atau *anomalies* pernah terjadi beberapa kali. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pergantian cara pandang dari yang lama ke yang baru. Nicholas Hendry (1995) (dalam Keban, 2014: 31-33) mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam administrasi negara, yaitu:

1.) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926)

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow pada tahun 1900 mengemukakan bahwa pusat perhatian dari politik adalah kehendak rakyat, sedangkan pusat perhatian dari administrasi adalah implementasi dari kehendak rakyat tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi diaktualisasikan melalui pemisahan antara lembaga legislatif yang memiliki tugas untuk menyampaikan kehendak rakyat dan lembaga eksekutif yang memiliki tugas untuk melaksanakan kehendak rakyat tersebut. Sedangkan lembaga yudikatif membantu lembaga legislatif dalam menentukan tujuan dan memformulasikan kebijakan. Namun, paradigma ini hanya menekankan pada aspek *locus* saja yaitu birokrasi pemerintahan, sedangkan *focus* masih kurang dibahas secara terperinci.

2.) Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Paradigma ini diperkenalkan oleh Willoughby, Gullick dan Urwick yang mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh manajemen klasik yaitu Fayol dan

Taylor. Dalam paradigma ini, *focus* dari administrasi publik adalah prinsip administrasi yang dikenal sebagai prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dapat diterapkan secara umum. Namun, *locus* dari administrasi publik tidak jelas karena tokoh-tokoh pada paradigma ini menganggap bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku secara luas di mana saja, termasuk di organisasi pemerintah. Sehingga, *focus* lebih ditekankan daripada *locus*.

3.) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Paradigma ini menyatakan bahwa Administrasi Publik sebagai ilmu politik, yang mana *locus*nya adalah birokrasi pemerintahan. Namun, karena prinsip-prinsip administrasi publik memiliki banyak kelemahan, maka *focus*nya menjadi tidak jelas. Sehingga, ilmu politik menjadi disiplin yang sangat mendominasi dunia administrasi publik pada masa ini yang menyebabkan administrasi publik mengalami krisis identitas.

4.) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Pergeseran paradigma ini menyebabkan ilmu administrasi bukan lagi menjadi bagian dari ilmu politik, melainkan lebih mengarah kepada ilmu manajemen. *Focus* dari paradigma ini yaitu analisis manajemen, perilaku organisasi, dan penerapan teknologi modern yang dapat diterapkan dalam dunia administrasi publik. Namun, *locus* dari paradigma ini menjadi tidak jelas.

5.) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970 – 1990)

Pada paradigma ini, administrasi publik menjadi lebih terfokus pada ilmu kebijakan dan penilaian terhadap hasil dari kebijakan yang sudah dibuat. Hal tersebut dianggap sebagai suatu rantai penghubung antara *focus* administrasi publik dengan *locus*nya, sehingga paradigma ini sudah mempunyai *focus* dan *locus* yang jelas. *Focus*nya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan teori kebijakan publik. Sedangkan *locus*nya adalah persoalan dan kepentingan publik dalam urusan kebijakan publik.

6.) Paradigma *Governance* (1990 – sekarang)

Konsep paradigma ini bukan merupakan konsep baru, tetapi memasukkan maksud baru dalam pelaksanaan administrasi publik, dan paradigma ini telah diaplikasikan dari tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Paradigma ini dapat didefinisikan sebagai bentuk pelaksanaan dan kekuasaan pemimpin politik untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Paradigma ini juga merupakan proses yang kompleks dimana beberapa sektor menetapkan serta menyebarluaskan kebijakan publik yang memberikan pengaruh langsung terhadap interaksi masyarakat dan pemerintah, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Paradigma *governance* berusaha untuk menyusun kembali peranan sektor publik melalui partisipasi masyarakat dan taat kelola jaringan atau kerja sama. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sementara sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi. Sedangkan masyarakat madani (*civil society*) menyelenggarakan interaksi

sosial dan politik secara sehat. Paradigma ini memperkuat interaksi antar ketiga sektor tersebut dalam mempromosikan *people centered development*.

Berdasarkan keenam paradigma Administrasi Publik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kelima yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik. Hal ini dikarenakan *focus* dan *locus*nya sudah jelas. *Focus* dalam penelitian ini adalah Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak, sedangkan *locus*nya adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung Jakarta Timur.

1.5.2.3. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014: 35), Kebijakan Publik adalah segala keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dye berpendapat jika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu maka itu pasti ada tujuannya dan jika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu maka itu juga merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan. Sedangkan James E. Anderson (dalam Anggara, 2014: 31) menyatakan kebijakan publik merujuk pada keputusan yang dirumuskan oleh institusi dan pejabat pemerintah.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan pemerintah sebagai penguasa yang dalam perumusannya tentu mempertimbangkan kepentingan publik. Kebijakan publik,

baik dengan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat.

Tahap-tahap dalam penyusunan suatu kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Anggara, 2014: 120-121), adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan *Agenda/Agenda Setting*. *Agenda setting* adalah tahapan untuk memproses dan menganalisis berbagai isu-isu publik melalui penilaian dengan beberapa kriteria untuk dapat memilih masalah publik, kemudian menentukan prioritas yang akan dimasukkan dalam agenda kebijakan.
- 2) Formulasi Kebijakan. Setelah masalah masuk dalam agenda kebijakan, para pembuat kebijakan selanjutnya akan membahasnya. Masalah-masalah tersebut kemudian diidentifikasi untuk mencari solusi terbaik guna memecahkan masalah tersebut.
- 3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan wewenang pada proses pemerintahan. Jika legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti petunjuk pemerintah. Namun, penting bagi warga negara untuk mempercayai bahwa tindakan pemerintah adalah legal dan sah.
- 4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap kebijakan yang meliputi aspek substansi, implementasi, hingga dampaknya yang dilakukan sepanjang proses kebijakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan mencakup penilaian terhadap tahap pengidentifikasian masalah, program yang diusulkan untuk

mengatasi masalah tersebut, pelaksanaan kebijakan, serta dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

1.5.2.4. Evaluasi Kebijakan

Ralph W. Tyler (dalam Muh. Firyal Akbar & Mohi, 2018: 9-10) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan guna menilai sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai atau terealisasi. Menurut Stufflebeam (dalam Muh. Firyal Akbar & Mohi, 2018: 16), mengungkapkan bahwa evaluasi adalah proses pendeskripsian, pengumpulan dan pemberian informasi yang berguna untuk pengambil keputusan untuk menentukan alternatif keputusan. Definisi lain dari evaluasi dikemukakan oleh Arikunto & Jabar (2018: 2), yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencari dan mengumpulkan informasi, yang kemudian dapat digunakan untuk memilih dan memutuskan tindakan yang tepat dalam pengambilan keputusan.

1.5.2.5. Evaluasi Program

Menurut Arikunto & Jabar (2018: 4), program adalah suatu sistem yang dibentuk dan dijalankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal yang ingin dicapai, maka dibutuhkan adanya kegiatan evaluasi untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan tersebut.

Suchman (dalam Ambiyar & Muharika, 2019: 39), mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk menentukan keberhasilan program dalam

mencapai tujuan awal dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan menurut Mets (dalam Ambiyar & Muharika, 2019: 19-20), evaluasi program merupakan instrumen penting dalam pengambilan keputusan, yang berperan dalam menganalisis informasi guna memperbaiki dan memperkuat kualitas program dari suatu lembaga atau organisasi, serta meningkatkan dampak positif atau manfaat bagi sasaran program.

Berdasarkan beberapa definisi terkait evaluasi program menurut para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi tersebut melihat tingkat keberhasilan program, manfaat yang dirasakan kelompok sasaran, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa saja yang telah berhasil dicapai dan apa saja yang belum berhasil tercapai dari suatu program. Dengan kata lain, melalui evaluasi akan diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, ataupun kinerja suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan programnya yang bertujuan untuk menentukan keputusan yang akan dilakukan lembaga atau organisasi tersebut dalam rangka meningkatkan keberhasilan programnya (Hajaroh, 2019: 28).

1.5.2.6. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Mulyatiningsih (dalam Sulistiarini, 2019: 17), tujuan dari kegiatan evaluasi program adalah:

- 1.)Menggambarkan kontribusi program terhadap pencapaian hasil atau tujuan awal dari suatu organisasi atau lembaga.
- 2.)Menentukan keputusan mengenai keberlanjutan suatu program, seperti keputusan untuk meneruskan, memperbaiki ataupun memberhentikan suatu program.

Sudjana (dalam Akbar & Mohi, 2018: 42-43), mengemukakan bahwa tujuan dari kegiatan evaluasi program yaitu untuk menyajikan informasi atau data-data kepada pembuat program yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam evaluasi program menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar, sebagai berikut:

- 1.)Berbagai macam data atau informasi yang dibutuhkan guna menentukan keputusan apakah pelaksanaan suatu program perlu dilanjutkan, dihentikan, ataupun dimodifikasi/diperbaiki.
- 2.)Kriteria-kriteria tentang program-program yang dinilai paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- 3.)Informasi mengenai elemen-elemen dari setiap program dan kombinasi yang paling efektif antara elemen-elemen program tersebut berdasarkan alokasi dana yang diberikan, sehingga dapat mencapai efisiensi dalam pelaksanaan program.
- 4.)Informasi mengenai berbagai karakteristik sasaran program sehingga pengambil keputusan dapat menentukan kelompok individu, lembaga, komunitas, atau kelompok mana yang paling terpengaruh oleh layanan yang diberikan oleh setiap program.

- 5.) Informasi mengenai metode baru yang dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan evaluasi dampak program.

1.5.2.7. Model Riset Evaluasi Program

Dalam menganalisis keberhasilan Program RPTRA Bambu Petung dalam upaya pemenuhan hak anak, peneliti menggunakan model evaluasi *CIPP* yaitu *Context, Input, Process, dan Product*. Model evaluasi CIPP digagas oleh Stufflebeam pada tahun 1960an dan dikembangkan oleh *National Study Committee on Evaluation of Phi Delta Kappa*. Model evaluasi CIPP digunakan untuk melihat dan menganalisis program mulai dari latar belakang dibentuknya program hingga pencapaian hasil program setelah diimplementasikan, dengan kata lain model CIPP mengevaluasi program secara komprehensif atau menyeluruh (Mulyatiningsih, 2011: 124-125).

Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 (empat) jenis evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1.) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*).

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 312), evaluasi konteks bertujuan untuk menilai kebutuhan yang mendasari program, masalah dan tujuan program yang ditargetkan. Komponen evaluasi ini digunakan untuk melihat dan menganalisis konteks suatu program, yaitu mengidentifikasi masalah yang melatarbelakangi munculnya program sehingga dapat diketahui apakah program yang direalisasikan sudah menjadi program yang tepat dan sesuai dengan masalah kebutuhan yang mendasari. Kemudian komponen ini juga digunakan untuk melihat respon atau dukungan dari sasaran program terhadap kemunculan program, serta digunakan juga untuk menganalisis

kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan (Mulyatiningsih, 2011: 127-129).

Kriteria dalam evaluasi konteks secara lebih dalam adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan, yaitu mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi dan akan dipenuhi oleh program yang telah direalisasikan, b. Dukungan lingkungan, yaitu mengidentifikasi respon lingkungan sekitar terhadap program, serta c. Tujuan, yaitu mengidentifikasi kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan yang dinilai (Septiani, 2020: 36-37).

2.) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*).

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 312), evaluasi input bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana yang ada pada suatu program guna melihat kontribusi dari ketiga aspek tersebut terhadap pelaksanaan program.

Fungsi komponen ini adalah untuk menilai masukan yang ada dalam program, yakni dengan mengenali apakah program telah memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kemampuan sumber daya dalam hal material, peralatan, tenaga kerja, dan anggaran yang terdapat dalam program tersebut (Mulyatiningsih, 2011: 129-130)

Evaluasi input dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu; 1.) sumber daya manusia yang terdiri dari pelaksana program dan penerima manfaat; 2.) sumber daya finansial (anggaran); dan 3.) sarana prasarana

Ruang Publik Terpadu ramah Anak (RPTRA) dalam memfasilitasi anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

3.) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*).

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 312-313), dalam evaluasi proses, evaluator menilai pelaksanaan dari rencana program yang sudah ditetapkan. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai pengaplikasian program yang sudah ditetapkan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut, yaitu dengan melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*).

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 313), evaluasi produk membantu mengidentifikasi dan menilai pencapaian penuh program. Fungsi dari Komponen ini yaitu untuk mengevaluasi produk dari suatu program yang telah diimplementasikan, yaitu dengan melihat keberhasilan program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan program dan menilai dampak yang dirasakan oleh sasaran program.

Evaluasi produk bertujuan untuk mengidentifikasi suatu program apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan menilai dampak dan manfaat dari adanya program tersebut (Septiani, 2020: 38).

1.5.2.8. Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan program turunan dari Kebijakan Kota Layak Anak. RPTRA menjadi program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dikembangkan dengan menggabungkan semua komitmen dan potensi

sumber daya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, melalui proses perencanaan menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk menyediakan fasilitas fisik dan non-fisik yang terintegrasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di ruang publik. (Septiani, 2020: 40).

Tujuan dibangunnya RPTRA antara lain untuk menyediakan taman terbuka publik yang ramah bagi anak-anak dalam berbagai rentang usia, tempat rekreasi dan bersosialisasi, sarana dan prasarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan anak dalam bingkai Kota Layak Anak (Sulistiari, 2019: 44).

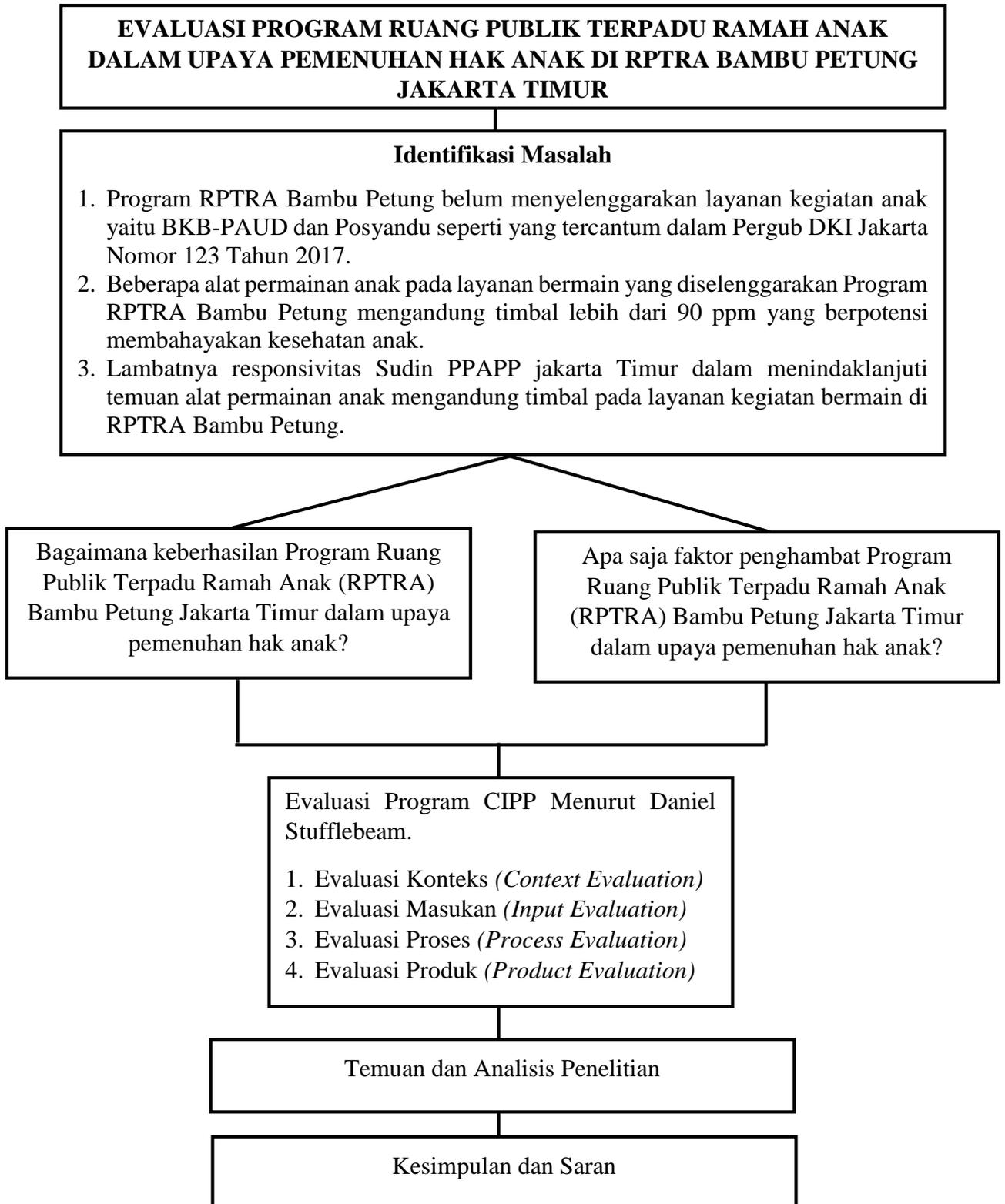
1.5.2.9. Pemenuhan Hak Anak

Menurut Hadiwijoyo (2015) (dalam Septiani, 2020: 45), pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab fundamental yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya hak-hak anak, serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap anak, terutama yang terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak. Kebijakan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan anak, pemenuhan hak anak, dan kepentingan yang terkait dengan anak

Pemenuhan hak anak sangat penting karena mempengaruhi kualitas kehidupan mereka sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Anak-anak perlu dilindungi bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh orang tua dan keluarga

sebagai pendamping yang aktif dalam aktivitas sehari-hari anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.

1.6. Kerangka Berpikir Penelitian



1.7. Fenomena Penelitian

1. Evaluasi Program dalam penelitian ini berkaitan dengan evaluasi penilaian keberhasilan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung dalam upaya memenuhi hak atau kebutuhan tempat bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta faktor-faktor penghambat yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Adapun fenomena penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1.) Keberhasilan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan hak anak. Kriteria evaluasi program dalam penelitian ini menggunakan 4 jenis evaluasi di dalam Teori Evaluasi Program CIPP yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam, yaitu:

a.)Evaluasi Konteks.

Evaluasi konteks akan dianalisis berdasarkan sub kriteria berikut:

1. Kebutuhan Pemenuhan Hak Anak.
 - Kesesuaian kebutuhan pemenuhan hak anak dengan Program RPTRA Bambu Petung yang terealisasi.
2. Dukungan lingkungan.
 - Respon masyarakat terhadap program RPTRA Bambu Petung.
3. Tujuan Program
 - Kesesuaian layanan kegiatan anak dalam Program RPTRA Bambu Petung dengan tujuan pemenuhan hak anak yang ingin dicapai.

b.)Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan akan dianalisis berdasarkan sub kriteria berikut:

1. Sumber daya manusia di dalam Program RPTRA Bambu Petung.

- Ketersediaan jumlah tim pengelola RPTRA Bambu Petung.
 - Kompetensi pengelola RPTRA Bambu Petung dalam melaksanakan tugas.
 - Kesesuaian sistem perekrutan pengelola RPTRA Bambu Petung dengan aturan yang berlaku.
 - Ketersediaan tenaga pengajar atau pelatih dalam layanan kegiatan anak di RPTRA Bambu Petung.
 - Ketersediaan peran masyarakat dalam pemeliharaan RPTRA Bambu Petung.
2. Sumber daya finansial di dalam Program RPTRA Bambu Petung.
- Ketersediaan dan pemanfaatan alokasi dana APBD Provinsi DKI Jakarta terhadap Program RPTRA Bambu Petung.
 - Ketersediaan dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Program RPTRA Bambu Petung.
3. Sarana dan prasarana RPTRA Bambu Petung.
- Ketersediaan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program RPTRA Bambu Petung.
 - Kondisi dan kelayakan sarana dan prasarana pada Program RPTRA Bambu Petung terhadap keselamatan anak.
 - Kesesuaian jenis alat permainan di RPTRA Bambu Petung dengan karakteristik anak.
 - Penempatan tata letak alat permainan anak di RPTRA Bambu Petung terhadap keamanan dan keselamatan anak.

- Respon terhadap kasus penggunaan bahan timbal pada alat permainan di RPTRA Bambu Petung.

c.) Evaluasi Proses

Evaluasi proses akan dianalisis berdasarkan sub kriteria berikut:

1. Pelaksanaan Program

- Pelaksanaan layanan kegiatan anak pada Program RPTRA Bambu Petung dalam upaya mencapai tujuan pemenuhan hak anak.
- Partisipasi anak-anak dalam pelaksanaan layanan kegiatan anak pada Program RPTRA Bambu Petung.

d.) Evaluasi Produk

Evaluasi produk akan dianalisis berdasarkan sub kriteria berikut:

1. Pencapaian tujuan program

- Keberhasilan Program RPTRA Bambu Petung dalam mencapai pemenuhan hak anak.

2. Dampak Program

- Dampak Positif dan Negatif Program RPTRA Bambu Petung.

2.) Faktor penghambat Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Bambu Petung Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan hak anak, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia.
2. Sumber daya finansial.
3. Sarana dan prasarana.

1.8. Argumen Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah evaluasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam upaya pemenuhan hak anak, yang mana evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode sistematis untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menjawab pertanyaan tentang suatu program. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program, manfaat yang diperoleh, dan apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan standar dan kriteria yang sudah ditetapkan.

Dalam mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membuat rumusan masalah penelitian yaitu terkait bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan Program RPTRA Bambu Petung dalam upaya pemenuhan hak anak dan apa saja faktor penghambat Program RPTRA Bambu Petung. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan teori evaluasi program menurut Daniel L. Stufflebeam yang menyatakan bahwa untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu program, maka perlu dilakukan 4 jenis evaluasi, yakni; 1.) evaluasi konteks yang bertujuan untuk menganalisis apa saja kebutuhan, tujuan, dan kondisi lingkungan dalam Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung; 2.) evaluasi input yang bertujuan untuk menganalisis indikator yang membantu mencapai tujuan Program RPTRA Bambu Petung; 3.) evaluasi proses yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program serta partisipasi kelompok sasaran terhadap program; dan 4.) evaluasi produk yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Program RPTRA Bambu

Petung berjalan dengan baik atau tidak dengan menilai dampak dan manfaat dari adanya program tersebut. Serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang muncul dalam Program RPTRA Bambu Petung.

Dengan menggunakan teori model evaluasi program CIPP tersebut, maka akan didapat hasil penelitian yang detail, jelas, dan mendalam dari Program RPTRA Bambu Petung, baik mulai dari konteks yang melatarbelakangi dibentuknya program, masukan atau indikator-indikator yang membantu dalam pencapaian tujuan program, proses pelaksanaannya, hingga pencapaian dan dampak dari adanya program RPTRA Bambu Petung.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik/angka atau metode kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai gambaran kondisi yang terjadi secara alami di dalam konteks tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, memungkinkan untuk memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif (Nugrahani, 2014: 90-91).

Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menggali informasi lebih dalam, terkait keberhasilan dalam pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bambu Petung di Jakarta Timur. Pada penelitian ini, peneliti memiliki untuk menggunakan pendekatan kualitatif karena seluruh hasil dari kegiatan

wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dibangun secara lebih detail, dari setiap informan yang memberikan informasi. Hal tersebut karena setiap informan pasti memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing terhadap kondisi yang sedang diamati.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang cara mengatasi masalah yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Nugrahani, 2014: 32):

- a. Memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan perkembangan dari waktu ke waktu dalam suatu konteks yang alami tanpa adanya intervensi dari peneliti, serta mampu mengungkapkan hubungan yang normal dan realistis antara peneliti dan subjek informan,
- b. Membuka peluang untuk mendokumentasikan dengan sistematis pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori secara induktif,
- c. Dapat melakukan analisis induktif yang menitikberatkan pada eksplorasi, penemuan, dan logika induktif untuk menemukan teori yang berdasarkan pada pola dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi,
- d. Memungkinkan untuk mendeskripsikan perilaku manusia dalam konteks alami, yang mencakup keseluruhan konteks secara menyeluruh. Mengingat

bahwa suatu fenomena hanya dapat dipahami secara utuh ketika dilihat dalam keseluruhan konteksnya.

Tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran informasi yang rinci, mendalam, dan komprehensif terkait keberhasilan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung dalam upaya pemenuhan hak anak, serta faktor penghambat dalam Program tersebut.

1.9.2. Situs Penelitian

Penentuan situs atau lokus penelitian merupakan langkah yang signifikan dan penting dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan merasa lebih mudah dan terarah dalam melakukan penelitian jika sudah menetapkan lokasi penelitian, karena dengan menetapkan lokasi penelitian maka akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan lebih terfokus. Lokus yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah RPTRA Bambu Petung yang berada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut dikarenakan RPTRA Bambu Petung merupakan RPTRA yang berhasil meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Standarisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak se-Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Namun, dalam pelaksanaannya telah ditemukan kasus adanya penggunaan bahan timbal dengan konsentrasi tinggi dari cat kayu dan besi berwarna-warni yang dipakai pada beberapa alat bermain anak, seperti ayunan dan bangku. Padahal, kandungan bahan timbal yang cukup tinggi ini dapat masuk ke tubuh anak melalui mulut, kulit, dan

saluran napas. selain itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keracunan timbal terbukti memicu berkurangnya kecerdasan anak keterbelakangan mental. Timbal menyumbang sekitar 0,6 persen dari beban penyakit global.

1.9.3. Subjek Penelitian

Menurut Moleong (1990) (dalam Nugrahani, 2014: 61-62), subjek penelitian adalah orang yang memiliki pemahaman terkait situasi dan kondisi latar penelitian sehingga pemahamannya tersebut dibutuhkan dalam penelitian untuk dapat memberi informasi yang valid. Agar mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dari Program Ruang Publik Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung dalam upaya pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan subjek penelitian yang dapat memenuhi parameter dan dapat mengungkap serta menjelaskan hal diatas sehingga memungkinkan perolehan data yang rinci, mendalam, dan valid. Parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a.) Mengetahui regulasi program RPTRA sebagai upaya pemenuhan hak anak di Jakarta Timur.
- b.) Mengetahui proses pelaksanaan dan pengelolaan Program RPTRA Bambu Petung.
- c.) Mengetahui seluruh seluk beluk RPTRA Bambu Petung dari tujuan pembangunan hingga pelaksanaan program.

- d.) Terlibat langsung dalam kegiatan implementasi/pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Bambu Petung.
- e.) Terlibat langsung sebagai koordinator/penanggung jawab/pengelola RPTRA Bambu Petung.
- f.) Mengetahui kondisi dan kegiatan yang ada di RPTRA Bambu Petung secara menyeluruh.
- g.) Merasakan manfaat dari adanya Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di RPTRA Bambu Petung.

Dari parameter di atas, subjek penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik dalam penelitian ini yaitu:

- 1.) Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Kota Jakarta Timur.
- 2.) Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung.
- 3.) Masyarakat sebagai pengunjung/penerima manfaat dari Program RPTRA Bambu Petung.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Data kualitatif juga melibatkan interpretasi konsep untuk menerjemahkan data mentah menjadi uraian, penjelasan, atau deskripsi. Cara yang dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dengan tiga tahapan yang terdiri dari:

- a.) Reduksi data (*data reduction*). Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi dan mengenali data yang bersifat abstrak dan masih dalam bentuk mentah melalui proses pengkodean, summarisasi, atau kategorisasi.
- b.) Pengorganisasian (*organization*). Pada tahap pengorganisasian, peneliti mengintegrasikan semua data yang telah diperoleh menjadi satu kesatuan informasi.
- c.) Interpretasi data (*interpretation*). Tahap interpretasi data melibatkan kolaborasi antara reduksi data dan pengorganisasian yang telah diatur secara sistematis dan logis untuk kemudian mencapai suatu kesimpulan.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, sementara sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi adalah tindakan pengamatan yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai kejadian atau fenomena yang ditemui sesuai kondisi yang sebenarnya secara sistematis, logis, rasional dan objektif. Sedangkan, wawancara adalah proses

untuk mendapatkan keterangan atau informasi terkait topik penelitian yang dilakukan melalui dialog tatap muka antara peneliti sebagai pewawancara dan narasumber yang diwawancarai.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui analisis literatur, studi kepustakaan, studi dokumentasi, serta referensi lainnya seperti media cetak dan media online, serta karya ilmiah lain yang terkait dengan kebijakan, program, dan aspek ruang publik ramah anak yang relevan dengan penelitian ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1.) Metode Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi yang terjadi melalui pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan narasumber, yang dilakukan secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai topik penelitian.

Anas Sudijono (1996: 82) menyatakan bahwa metode wawancara memiliki beberapa keunggulan, diantaranya peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Narasumber dapat menjelaskan jawabannya dengan lebih terperinci, serta memungkinkan peneliti untuk

mengulang pertanyaan yang tidak jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasi informasi yang diberikan oleh narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara rinci, mendalam, dan komprehensif dengan narasumber atau informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait topik penelitian penulis. Narasumber atau informan tersebut diantaranya Suku Dinas PPAPP Kota Jakarta Timur, Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung dan masyarakat sebagai pengunjung/penerima manfaat dari Program RPTRA ini. Alat bantu yang digunakan adalah pedoman wawancara atau *interview guide* yang berisi kisi-kisi kasar terkait pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber/informan, kamera untuk mendokumentasikan proses wawancara, buku catatan, dan alat perekam suara.

2.) Metode Observasi Langsung

Observasi merupakan suatu proses dimulai dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, di mana data lapangan yang terkumpul kemudian dicatat secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena yang ditemui dalam situasi yang sesungguhnya.

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung secara kausal di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung untuk melihat, mengetahui, dan menganalisis secara langsung terkait keadaan lapangan yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam, rinci, dan valid.

3.) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengakses data historis. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengkaji arsip-arsip dan sumber-sumber tertulis seperti buku yang berisi pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian. Arikunto & Jabar (2018: 201), megemukakan bahwa metode dokumentasi merupakan proses mencari data yang melibatkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sumber-sumber lainnya. Metode dokumentasi memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat bukti-bukti dari sumber lain. Pertama, penggunaan metode dokumentasi membantu dalam memverifikasi ejaan yang benar, judul, atau nama organisasi yang telah disebutkan dalam wawancara. Kedua, metode dokumentasi dapat memberikan rincian spesifik tambahan untuk mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Ketiga, dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk membuat inferensi atau kesimpulan lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil dari metode wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, video, buku-buku tentang teori pendapat para ahli, media massa online, serta jurnal penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan sepanjang rentang waktu dari data awal hingga data terakhir dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknis data

kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Prsetya Irawan (2006: 76-80), sebagai berikut:

- 1.) Pengumpulan data mentah. Pada tahap pengumpulan data mentah ini, peneliti menghimpun data mentah yang diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan dan studi dokumentasi.
- 2.) Transkrip data. Pada tahap ini, peneliti memulai proses mengubah seluruh data yang diperoleh menjadi transkrip tertulis yang disusun secara sistematis.
- 3.) Pembuatan koding. Peneliti membaca secara teliti dan memahami transkrip data yang telah dibuat sebelumnya untuk mengidentifikasi kata kunci yang akan diberikan kode. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam proses pengkategorian data.
- 4.) Kategorisasi data. Peneliti memulai proses penyederhanaan data dengan melakukan pengkategorian data ke dalam kategori-kategori tertentu.
- 5.) Kesimpulan sementara. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikategorikan sebelumnya.
- 6.) Triangulasi. Triangulasi merupakan proses memeriksa dan memverifikasi antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.
- 7.) Kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir melibatkan peneliti dalam menyajikan hasil penelitian dan mengembangkan teori yang telah ada.

1.9.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Pemeriksaan kualitas data (*goodness criteria*) atau uji keabsahan data adalah evaluasi terhadap kepercayaan data penelitian guna memastikan kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi (Sugiyono, 2012: 270).

1.) Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan suatu evaluasi terhadap kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Tujuan dari uji kredibilitas ini adalah untuk memastikan bahwa tingkat kepercayaan yang sesuai telah tercapai, serta untuk menunjukkan derajat kepercayaan terhadap temuan-temuan melalui pembuktian yang dilakukan terhadap kenyataan yang telah diteliti secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang digunakan yaitu triangulasi. Menurut Sugiyono (2012: 327), triangulasi adalah suatu metode verifikasi data yang dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu mengumpulkan informasi yang akurat dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau melakukan wawancara dengan beberapa subjek (narasumber) yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah untuk memperoleh kebenaran yang lebih kuat dan mengkonfirmasi hasil penelitian.

2.) Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah metode untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada populasi di mana sampel penelitian tersebut diambil. Dalam penelitian ini, uji transferabilitas akan dilakukan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis terhadap hasil penelitian, dengan tujuan agar hasil penelitian mudah dipahami oleh orang lain dan dapat diterapkan pada populasi yang relevan dengan sampel penelitian ini.

3.) Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas (*dependability*) dalam penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai reliabilitas. Reliabilitas suatu penelitian menunjukkan sejauh mana penelitian tersebut dapat direplikasi atau diulang oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif ini, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing yang independen yang akan mengaudit semua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan audit dengan cara berkonsultasi kembali kepada pembimbing. Pembimbing akan bertindak sebagai auditor yang akan mengaudit seluruh proses penelitian. Peneliti akan berkonsultasi dengan pembimbing untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan atau kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan selama proses penelitian dilakukan.

4.) Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Menguji konfirmabilitas (*confirmability*) dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji objektivitas. Suatu penelitian dianggap objektif jika hasilnya telah disepakati oleh banyak orang. Terdapat empat teknik yang digunakan untuk melakukan uji konfirmabilitas, yaitu: 1) meningkatkan ketelitian dan ketekunan, 2) melakukan triangulasi sumber, 3) melakukan diskusi dengan rekan sejawat, dan 4) menggunakan sumber referensi yang relevan.